

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditujukan untuk membatasi studi penelitian sehingga objek yang diteliti tidak akan menyebar terlalu luas. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 ini adalah untuk menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD. Penelitian ini akan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang mulai berlaku pada tahun 2011, tentang Tata Cara Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Fokus penelitian adalah:

1. Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD yang bersumber dari gaji dan tunjangan yang diberikan secara teratur setiap bulannya.
2. Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pomdam V/ Brawijaya Surabaya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Mekanisme penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pomdam V/ Brawijaya Surabaya disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung, dan situs adalah tempat peneliti dapat menangkap kejadian secara langsung. Upaya penentuan lokasi dan situs penelitian akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Pomdam V/ Brawijaya Surabaya, yang beralamat di Jl. Raden Wijaya No.3, Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan situs penelitian adalah Ruang Juru Bayar Pomdam V/ Brawijaya. Alasan dipilihnya Pomdam V/ Brawijaya Surabaya sebagai lokasi penelitian adalah karena instansi ini melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

### D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena melalui sumber data berbagai informasi yang menunjang penelitian dapat diperoleh. Menurut Silalahi, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah suatu objek atau dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utama yang disebut sebagai *first-hand information*. Data yang dikumpulkan berasal dari situasi langsung yang aktual ketika peristiwa itu terjadi (Silalahi, 2006:265). Data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan Juru Bayar instansi yang bersangkutan, yakni juru bayar Pomdam V/ Brawijaya Surabaya.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder ini bisa berupa artikel-artikel dalam surat kabar ataupun majalah yang populer, buku, artikel-artikel dari jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan, arsip organisasi, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei terdahulu, catatan-catatan publik mengenai peristiwa-peristiwa resmi serta catatan-catatan perpustakaan (Silalahi, 2006:266-268).

Data sekunder yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berasal dari laporan dan dokumen perhitungan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD yang diperoleh dari instansi terkait. Data ini nantinya akan digunakan sebagai penunjang analisis dan interpretasi sehubungan dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2000:119). Menurut Mohammad Ali dalam Gulo (2000: 119-120) keunggulan yang dapat diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan langsung kepada responden adalah informasi yang diperoleh langsung diketahui obyektifitasnya dan memungkinkan diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang dapat dimengerti.

Jenis wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Sebelumnya peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Selain bertanya dan menyimak jawaban, peneliti juga mencatat jawaban-jawaban dan membuat catatan lengkap hasil wawancara.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2011: 329). Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen atau arsip dari instansi yang akan diteliti (Nasution, 2003:143). Dalam penelitian ini,

data yang diperoleh adalah data sekunder berupa profil instansi, dan laporan yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

#### **F. Analisis Data**

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif langkah awal yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan suatu data ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Setelah itu analisis dilakukan untuk memberikan penjabaran, penggambaran dan pengungkapan fakta mengenai suatu data agar lebih mudah dipahami. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah, sebagai berikut:

1. Analisis Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya.
2. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pomdam V/ Brawijaya Surabaya.
3. Analisis pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pomdam V/ Brawijaya Surabaya.
4. Analisis penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pomdam V/ Brawijaya Surabaya.
5. Menginterpretasikan data yang telah dianalisis guna menemukan pemecahan masalah terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
6. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.